SOSIOLOGI GENDER: Poligami Perspektif Hukum Islam

Oleh:

Ahmad Muzakki

Fakultas Syariah IAI Ibrahimy Situbondo

muzakkipasca@gmail.com

Abstract

Polygamy has been a debate among some scholars of Islam about whether or not to allow it. After investigation, the actual points of that debate can be found in the practice of polygamy that happen in society. Gender activists who disagree and opposed polygamy actually oppose the practice of polygamy that opposes polygamy lies in the practice of polygamy that oppresses despotically to women. Hence the verse about the permissibility of polygamy should not be deprived to legalize the satisfaction of the sexual libido of mens.

Otherwise, that verse should be placed in the study of sharia law that releases with no disregard the historical aspects of the practice of polygamy which is exemplified by the Prophet. With this perspective, the dimensions of morality in the verse of polygamy become the central point for consideration, because, the law without ethics is a wicked, and ethics without law is just utopia that far from harmonious and desirable social regulation building. Necessarily Muslims, who want to polygamy, not only follow the Sharia law but also follow the regulations of law that applied in Indonesia.

Keywords: Poligami, Gender, dan Hukum Islam

A. Pendahuluan

Emansipasi wanita dan hak asasi manusia sering menjadi perbincangan hangat di tengah umat. Salah satu topik yang menarik adalah poligami. Masalah ini sempat menjadi topik utama media-media Indonesia ketika sang da'i kondang, KH. Abdullah Gymnastiar atau yang akrab dipanggil Aa Gym melakukan poligami. Banyak para wanita yang tidak senang bahkan tidak setuju terhadap keputusan Aa Gym tersebut.

Berbagai kerancuan berpikir antipoligami pun menjadi konsumsi harian para istri. Karena itu, tak sedikit para istri yang dipoligami merasa jengkel dan tersulut emosi. Ibarat api dalam sekam. Baranya terus menjalar, perlahan namun pasti.

Luapan kemarahan akhirnya menjadi solusi. Para suami dihujat

dan digugat. Tak sedikit dari mereka yang tercemar nama baiknya bahkan terempas dari kedudukannya. Seakan telah melakukan dosa besar yang tak bisa diampuni lagi. Lain masalah ketika para suami itu berbuat serong, punya wanita idaman lain (WIL) yang tak halal baginya alias selingkuh. Reaksi sebagian istri justru tak sehebat ketika dipoligami.

Bahkan, tak sedikit dari mereka yang diam seribu bahasa. Yang penting tidak dimadu. Itulah sekira letupan hati mereka. Tak heran, bila diantara para suami bermasalah itu lebih memilih berbuat selingkuh daripada poligami. Bisa jadi karena pengalaman mereka bahwa selingkuh itu lebih aman daripada poligami. Sampai-sampai ada sebuah pelesetan, selingkuh itu selingan indah keluarga utuh. Padahal selingkuh itu menjijikkan. Selingkuh adalah zina. Selingkuh diharamkan dalam agama dan tak selaras dengan fitrah suci manusia. Demikianlah diantara ragam fakta unik yang terjadi dalam ranah sosial kemasyarakatan kita.

Memang pada kenyataannya, poligami yang dipraktekkan oleh sebagian masyarakat kadang tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam Islam. Kemungkinan besar aksi kontra poligami terjadi akibat praktek poligami yang salah. Sebenarnya ada beberapa syarat bagi mereka yang ingin melakukan poligami. Meskipun demikian, tetap saja muncul pro kontra tentang hukum poligami. Terutama di kalangan aktivis gender yang menyuarkan ketidaksetujuannya terhadap pernikahan poligami karena dianggap sebagai penindasan terhadap kaum perempuan.

Sebenarnya, beristeri lebih dari seorang atau istilah popularnya poligami, telah dikenal luas dalam masyarakat di seluruh dunia. Dari generasi ke generasi, praktek poligami terdapat dalam berbagai lingkungan komunitas, dilakukan oleh semua bangsa di barat dan di timur. Perkawinan dengan isteri lebih dari satu ini telah berlangsung lama bahkan jauh sebelum datang masa Islam. Jumlahnya isteri yang dikawini pun sesukanya, tidak mengenal batasan.

Kehadiran Islam memberikan pengaturan dan batasan kebolehan melakukan poligami maksimal empat isteri. Untuk pelaksanaannya pun ditetapkan persyaratan mampu berbuat adil di antara isteri-isterinya. Dengan demikian, tudingan terhadap Islam bahwa Islam-lah yang mula-mula memperkenalkan praktek perkawinan poligami, sungguh tidak beralasan dan berlawanan dengan fakta. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa tradisi perkawinan poligami telah ada jauh sebelum Islam datang, terutama dilakukan di kalangan raja-raja, yang dalam pandangan rakyatnya dianggap sebagai simbol ketuhanan, oleh karena itu mereka dipandang suci.

Konsep awal poligami sebagaimana dilakukan Nabi Muhammad SAW pada awal masa Islam bukanlah suatu bentuk perkawinan yang mencitrakan dominasi dan hegemoni lelaki terhadap perempuan, apalagi sampai ke tingkat dehumanisasi perempuan, melainkan bentuk perkawinan yang memiliki tujuan yang sama seperti perkawinan lainnya (monogami). Bahkan dalam perkawinan poligami ini terkandung tujuan lain yang sangat mulia, yaitu penegakan keadilan di antara isteri-isteri, dan perlindungan hak anak-anak yatim perempuan, baik perlindungan yang menyangkut harta maupun pribadinya dari perlakuan kesewenang-wenangan yang sudah mentradisi pada masa itu.

Dalam penelitian ini akan dibahas tentang poligami perspektif hukum Islam, perundang-undangan, sosiologi gender dan dampak praktik poligami sebagai bentuk ketidakadilan gender bagi perempuan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan tentang konsep poligami dilihat dari sudut pandang agama Islam dan memberikan pertimbangan bagi pembaca untuk memilih berpoligami atau tidak.

B. Pembahasan

1. Pengertian Poligami

Kata *Monogamy* dapat dipasangkan dengan poligami sebagai antonim, *Monogamy* adalah perkawinan dengan istri tunggal yang artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja, sedangkan kata poligami yaitu perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Dengan demikian makna ini mempunyai dua kemungkinan pengertian; Seorang laki-laki menikah dengan banyak laki-laki kemungkinan pertama disebut *Polygini* dan kemungkinan yang kedua disebut *Polyandry*.

Hanya saja yang berkembang pengertian itu mengalami pergeseran sehingga poligami dipakai untuk makna laki-laki beristri banyak, sedangkan kata poligyni sendiri tidak lazim dipakai.¹

Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul, melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.²

¹ Achmad Kuzari, 1995, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo), hlm. 159.

² Al-Qamar Hamid, 2005, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi), hlm. 19.

Poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. Yang asli di dalam perkawinan adalah monogamy, sedangkan poligami datang belakangan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dari zaman ke zaman.

Menurut para ahli sejarah, poligami mula-mula dilakukan oleh raja-raja pembesar Negara dan orang-orang kaya. Mereka mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan kemudian dijadikan gundik dan sebagainya. Semakin kaya seseorang semakin tinggi kedudukannya, semakin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada dan jauh sebelum masehi.³

Poligami adalah salah satu bentuk masalah yang dilontarkan oleh orang-orang yang memfitnah Islam dan seolah-olah memperlihatkan semangat pembelaan terhadap hak-hak perempuan. Poligami itu merupakan tema besar bagi mereka, bahwa kondisi perempuan dalam masyarakat Islam sangat memprihatinkan dan dalam hal kesulitan, karena tidak adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana dikemukakan oleh banyak penulis, bahwa poligami itu berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan penggalan kata *Poli* atau *Polus* yang artinya banyak, dan kata *Gamein* atau *Gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Maka jika kata ini digabungkan akan berarti kata ini menjadi sah untuk mengatakan bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan. Batas poligami hanya sampai empat wanita saja.

2. Poligami Perspektif Hukum Islam

Ayat yang berbicara tentang poligami, paling tidak ditemukan dua ayat dalam surat an-Nisa' yaitu :

وَإِنْ حِفْظُكُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَمَامِي فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ حِفْظُكُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا

³ Aisjah Dahlan, 1969, *Membina Rumah Tangga Bahagia, Cet 1.* (Jakarta: Jamunu), hlm. 69

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa': 3).

Dalam menafsiri ayat di atas Ulama berbeda pendapat berkenaan dengan kebolehan dan bilangan maksimal wanita yang boleh dipoligami. Dalam tafsir Mafatihul Ghoib, Ar-Rozi memaparkan bahwa ada sekelompok kaum yang berpendapat bahwa tidak ada batas maksimal poligami. Pendapat mereka didasarkan kepada beberapa alasan. Diantaranya, ayat yang berbunyi , "*kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi*" adalah bersifat mutlaq dan mencakup kepada jumlah perempuan tanpa batas. Dalam ayat tersebut kata yang digunakan adalah النساء, yang menunjukkan perempuan secara mutlaq.⁴

Kelompok ini juga beralasan bahwa مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ dalam ayat adalah berfaidah *lil jam'il mutlaq*, artinya wawu tersebut mengindikasikan penjumlahan. Jika mengikuti alur pemikiran ini, maka poligami boleh 9 (2+3+4), atau bahkan 18 (2+2+3+3+4+4).

Pendapat dari kelompok ini juga dikuatkan dengan Hadits Mutawatir yang menjelaskan bahwa Nabi wafat meninggalkan 9 istri. Allah dalam Alquran memerintahkan umat Islam untuk mengikuti Rasulullah dan Rasulullah juga menyatakan bahwa barang siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, maka bukanlah termasuk golonganku.⁵

Pendapat ini ditentang oleh kelompok lain yang membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat. Pendapat ini didasarkan pada Hadits Nabi berkenaan dengan Ghailan yang ketika baru masuk Islam memiliki 10 Istri, sebagaimana sabda Nabi,

عن ابن عمر قال : أسلم غيلان الثقفي وعنده عشر نسوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمسك
أربعا وفارق سائرهن

⁴ Fakhruddin Ar-Razi, *Tafsir al-Razi/ Mafatihul Ghaib*, (Maktabah Syamilah, Juz 5), hlm. 48

⁵ Fakhruddin Ar-Razi, *Tafsir al-Razi/ Mafatihul Ghaib*, (Maktabah Syamilah, Juz 5), hlm. 49

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Ghailan al-Tsaqofi ketika masuk islam memiliki 10 istri. Lalu Rasulullah SAW bersabda: Ambillah 4 dan ceraikanlah yang lainnya.(HR. Ibnu Hibban)⁶

Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa Qois bin Harits ketika baru masuk Islam memiliki 8 isteri, lalu Rasulullah SAW memerintahkannya untuk memilih empat orang diantara yang 8. Karena ketika lebih dari empat istri dikhawatirkan terjerumus dalam kemaksiatan akibat tidak mampu melaksanakan kewajiban dan memberi hak-hak istri yang dipoligami.⁷ Adapun kebolehan Rasulullah untuk menikah lebih dari empat merupakan keistimewaan bagi Rasulullah SAW (*Khushusiyat*).

Kelompok selanjutnya menyatakan keharaman poligami apabila dilakukan tanpa adanya kemampuan untuk berlaku adil dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan serta dalam menemani istri/pembagian giliran menginap. Bahkan di beberapa negara yang mayoritas muslim ada aturan yang melarang melakukan poligami. Misalnya dalam UU Keluarga Tunisia (*code of personal status/majallat al-ahwal al-syakhsyah* no.66 tahun 1956) melarang poligami secara mutlak, dengan alasan pertama, intitusi budak dan poligami hanya boleh pada masa perkembangan, tetapi dilarang setelah menjadi masyarakat yang berbudaya. Kedua, Q.S. al-Nisā' (4): 3 yang menetapkan bahwa syarat poligami harus mampu berlaku adil itu hanya Rasul yang bisa berlaku adil.

Itulah beberapa ragam pendapat tentang jumlah maksimal istri yang boleh dipoligami dan tentang hukum melakukan poligami. Selanjutnya berkenaan dengan ayat poligami yang telah disebutkan di atas bahwa syarat poligami adalah mampu berbuat adil. Namun ayat di atas tidak memberikan penjelasan secara lengkap tentang dalam hal apa saja harus berlaku adil.⁸ Maka pada ayat berikutnya dijelaskan tentang objek keadilan yang harus dilakukan dalam poligami, sebagaimana firman Allah,

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء : 129)

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga

⁶ Ibnu Hibban, *Shohih Ibnu Hibban*, (Maktabah Syamilah, Juz 9), hlm. 181.

⁷ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatu Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu*, (Beirut: Darul Fikr, 2009), Juz 2, hlm. 17.

⁸ KH. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Menggugat Pemilihan Langsung*, (Jember: Pena Salsabila, 2009), hlm. 93.

kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa':129)

Bagian awal dari ayat ini menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil diantara para istri-istrinya, padahal adil merupakan syarat bagi orang yang akan berpoligami sebagaimana dalam surat an-Nisa ayat 3. Namun kejanggalan ini terjawab dengan penggalan ayat:

فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ .

Penggalan ayat ini menunjukkan bahwa keadilan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia adalah keadilan totalitas yaitu keadilan dalam semua persoalan. Oleh karena itu, fuqoha membagi keadilan menjadi 2 yaitu: *Pertama*, Keadilan dalam hal-hal yang konkrit-Material, seperti dalam masalah nafkah dan giliran bermalam. *Kedua*, Keadilan dalam hal-hal abstrak-Immateral, seperti cinta dan benci. Keadilan yang menjadi persyaratan dalam poligami adalah keadilan yang pertama, yaitu dalam hal-hal yang konkrit-material.⁹

Adapun dalam masalah cinta dan benci manusia tidak mampu berlaku adil. Oleh karena ini Rasulullah berdoa:

اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك

"Ya Allah inilah pembagianku yang aku mampu, maka jangan kau cela aku pada sesuatu yang engkau mampu dan tidak aku mampu."

3. Monogami dan Poligami Rasulullah

Rasulullah lebih lama bermonogami dari pada berpoligami. Istri pertama Rasulullah adalah Siti Khodijah. Rasulullah ketika masih beristri dengan Siti Khodijah, beliau tidak melakukan poligami, padahal saat itu poligami menjadi sesuatu yang biasa dikalangan masyarakat Quraish. Rasulullah memulai melakukan poligami setelah wafatnya Siti Khodijah. Umur beliau ketika berpoligami sudah 55 tahun. Istri-istri yang beliau poligami adalah janda-janda kecuali Siti Aisyah.

Ini membuktikan bahwa motivasi dari poligami Rasulullah bukanlah karena dorongan syahwat. Akan tetapi, Rasulullah berpoligami karena ada tujuan-tujuan mulia. Rasulullah menikahi Zainab karena wahyu dari Allah, Shofiyah dinikahi oleh Rasulullah dengan harapan kabilah di belakang Shafiyah banyak yang masuk Islam. Hafsa binti Umar dan Aisyah binti Abu Bakar dinikahi karena untuk lebih mempererat tali silaturahmi persahabatan beliau. Rasulullah menikahi Ummu Salamah

⁹ Ibid, 94-95

untuk melindungi anak-anaknya yang yatim dan mengurangi beban hidup Ummu Salamah.¹⁰

Jadi Rasulullah adalah seorang feminis muslim pertama yang tampil berani membela hak-hak kaum perempuan. Dengan poligami, maka Istri-istri Rasulullah akan tampil menjadi wanita sholehah, cerdas, dan mandiri. Di mana pada masa-masa sebelumnya wanita tidak banyak diberi kesempatan untuk maju. Dengan poligami inilah Rasulullah mencetak perawi hadist, penghafal Quran, mufti dan sebagainya.

Poligami Rasulullah memang sarat dengan setting penyelesaian beragam persoalan sosial saat itu. Ketika lembaga-lembaga lain lumpuh dan tidak mampu memberikan jalan keluar terhadap persoalan sosial kemasyarakatan, syariat Islam tampil dengan performa transformatif.¹¹ Rasulullah mempunyai misi mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan yang sebelumnya menjadi kaum yang termarginalkan dan tersubordinatkan.

Nabi menegaskan bahwa sebaik-baiknya laki-laki muslim adalah dia yang bersikap baik terhadap istrinya. Beliau menganjurkan lelaki agar memberikan perhatian lebih kepada wanita karena kelemahan dan keterbatasannya. Nabi bersikap adil dalam giliran tidur bersama istri-istrinya, pemberian tempat maupun nafkah.¹²

Aisyah pernah berkata, "Nabi tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian yang lain dalam membagi waktu tinggalnya bersama kami. Setiap hari beliau mengelilingi kami semua dan mendekat kepada seluruh istri beliau hingga sampai pada rumah istri yang hari itu merupakan bagiannya, kemudian beliau bermalam padanya. Jika Nabi sedang bepergian kemudian baru saja datang, beliau tidak pernah mengetuk rumah istrinya malam-malam.

Itulah sedikit gambaran bagaimana Rasulullah memperlakukan istri-istrinya dengan penuh keakraban dan keharmonisan. Poligami yang dipraktikkan oleh beliau sangatlah berakhlak. Beliau memperlakukan istri-istrinya dengan baik dan seadil-adilnya. Inilah yang perlu dijadikan teladan bagi orang-orang yang hendak melakukan poligami.

¹⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 229

¹¹ Abu Yasid, Munif Shaleh, *Epistemologi Fiqh, Unsur Subtansi, Metodologi dan Aplikasi Ajarannya*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2010), hlm. 74.

¹² Samiyah Menisi, *Muhammad Rahmat Bagi Wanita*, (Jakarta: PT. Qof Media Kreativa, 2016), hlm. 76.

4. Poligami dalam Perspektif Sosiologi Gender

Praktik poligami akan menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan gender. Ketidakadilan biasanya berupa pemiskinan perempuan atau marginalisasi perempuan. Hal ini timbul apabila seorang suami sebagai pencari nafkah melakukan poligami, sementara pihak istri yang hanya sebagai ibu rumah tangga. Dengan seorang istri, penghasilan seorang suami mungkin cukup untuk menafkahi istri tersebut. Namun, dengan melakukan praktik poligami maka gaji yang diterima suami akan terbagi lagi untuk istri-istri yang lain.¹³ Misal: seorang suami dengan seorang istri mempunyai penghasilan Rp1.000.000,- perbulan mungkin cukup untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Namun apabila seorang suami tersebut berpoligami, maka tentunya gaji yang sebesar itu mungkin kurang untuk menafkahi istri-istri dan anak-anaknya. Selain hal di atas, banyak dampak lain yang akan ditimbulkan dengan adanya praktik poligami, antara lain:

- a. Timbul perasaan inferior, menyalahkan diri sendiri, istri merasa tindakan suaminya berpoligami adalah akibat dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya.
- b. Ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Tetapi seringkali pula dalam prakteknya, suami lebih mementingkan istri muda dan menelantarkan istri dan anak-anaknya terdahulu. Akibatnya istri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari.
- c. Hal lain yang terjadi akibat adanya poligami adalah sering terjadinya kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis.
- d. Selain itu, dengan adanya poligami, dalam masyarakat sering terjadi nikah di bawah tangan, yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor pencatatan nikah (Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama). Perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah oleh negara, walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama. Bila ini terjadi, maka yang dirugikan adalah pihak perempuan karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi oleh negara. Ini berarti bahwa segala konsekwensinya juga dianggap tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya.

¹³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 240 .

5. Poligami Menurut Perundang-Undangan

a. Alasan Poligami Menurut Perundang-Undangan

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan juga dalam Bab IX KHI Pasal 57 seperti dijelaskan sebagai berikut: 1). Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2). Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan 3). Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI disebut *sakinah, mawaddah, dan rahmah*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami-istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (*mawaddah dan rahmah*).

b. Syarat-Syarat Poligami Menurut Perundang-Undangan

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *Pertama*, adanya persetujuan dari istri/isteri-isteri; *Kedua*, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-isteri dan anak-anak mereka; dan *Ketiga*, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.

c. Prosedur Poligami Menurut Perundang-Undangan

Prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 55, 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: Pasal 55 KHI. 1). Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri; 2). Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya; dan 3). Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.¹⁴

Pasal 56 KHI menerangkan 1). Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, 2). Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan 3). Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau ke empat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁵

Pasal 57 KHI menerangkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: 1). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 2). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan 3). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁶

Kalau Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami, kemudian ia memeriksa berdasarkan Pasal 57 KHI : 1). Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi; 2). Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan; dan 3). Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau Surat keterangan pajak penghasilan, atau Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Pasal 58 ayat (2) KHI, Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 2010, hlm. 58.

¹⁵ Ibid, hal. 59

¹⁶ Ibid, hal. 60.

istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Adapun tata cara teknis pemeriksaan menurut Pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: *Pertama*, dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan dan *Kedua*, pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) menegaskan:

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mengkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-sekurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan(bandingkan juga dengan Pasal 58 KHI). Namun, bila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975).

Kalau sang istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI). Apabila keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas,

dikenakan sanksi pidana. Persoalan ini diatur dalam Bab IX Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975: (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka: a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 10 ayat 3, 40 Peraturan Pemerintah akan dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah); b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat 1, 11, 12, dan 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas, merupakan pelanggaran.

Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan dimaksud, terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridhai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, sehingga mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi

Status hukum poligami adalah mubah. Mubah dimaksud, sebagai alternatif untuk beristri hanya sebatas 4 (empat) orang istri. Hal itu ditegaskan oleh Pasal 55 KHI bahwa beristeri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri. Adapun Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Maka, apabila tidak mampu berlaku adil, suami dilarang beristeri lebih dari satu.

Dasar pertimbangan KHI adalah hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibn Hibban yang mengungkapkan bahwa sesungguhnya Gailan Ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai 10 (sepuluh) orang istri. Mereka bersama-sama, dan dia masuk Islam. Maka Nabi Muhammad SAW. memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja di antaranya dan menceraikan yang lainnya.

6. Argumentasi Teologis Pendukung dan Penentang Poligami

Poligami merupakan suatu topik yang sering mengundang pro dan kontra diantara pendukung dan penentangnya. Para pendukungnya dengan dalil al-Quran dan dalih mengikuti jejak Rasulullah dengan tanpa ragu melakukan poligami. Sayangnya poligami yang dilakukannya sering tidak sesuai dengan al-Quran dan melenceng dari apa yang dicontohkan

oleh Rasulullah. Ayat al-Quran yang sering dijadikan dasar kebolehan poligami adalah surat an-Nisa` ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ حِفْظُكُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ حِفْظُكُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا [النساء/ 3]

Ayat ini sebenarnya turun berkenaan dengan peristiwa Urwah bin Zubair yang dititipi seorang anak yatim yang cantik dan kaya. Kemudian Urwan ingin mengawininya dengan tujuan agar terbebas dari membayar mas kawin, bisa menguasai hartanya dan berlaku tidak adil. Jadi sebenarnya tema sentral dari ayat ini adalah perintah berbuat adil kepada anak yatim.¹⁷ Ayat ini tidak dalam rangka memperkenalkan poligami, karena poligami telah dipraktekkan jauh sebelum datangnya Islam. Ayat ini hanya menjelaskan batas maksimal poligami dan syarat mampu adil bagi yang ingin berpoligami.

Dalam ayat ini jelas bahwa yang menjadi syarat poligami adalah adanya keadilan dan mampu untuk merealisasikan antara para istri-istri. Jika tidak mampu untuk berbuat adil, maka cukuplah satu. Jika tidak mampu bertanggung jawab kepada satu istri, cukuplah bersenang-senang dengan budaknya. Akan tetapi sering kali syarat adil ini dilupakan oleh sebagian pelakunya. Kadang lebih mendahulukan istri muda dari pada istri tua, tidak adil dalam memberi nafkah dan sebagainya. Sehingga sering kali poligami membawa bencana dan kehancuran dalam rumah tangga. Hal tersebut bisa didengar, dilihat dan dibaca di media cetak maupun elektronik.

Sementara di pihak lain, para penentang poligami beralasan bahwa hadist tentang larangan Rasulullah kepada Sayyidina Ali untuk mempoligami Sayyidah Fatimah adalah dalil ketidakbolehan berpoligami. Berikut diantara hadits tentang larangan Rasulullah kepada Sayyidina Ali untuk berpoligami.:

إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يَنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنَ ثُمَّ لَا آذَنَ ثُمَّ لَا آذَنَ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَ يَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِينِي مَا أَرَاهَا وَ يُؤْذِنُنِي مَا آذَاهَا

Bani Hisyam bin al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Aku tidak mengizinkan,

¹⁷ Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, hlm 199.

Aku tidak mengizinkan, Aku tidak mengizinkan, kecuali anak Abi Thalib (Ali) mau menceraikan anakku (Fatimah) dan menikahi anak mereka. Fatimah adalah bagian dari diriku, aku menderita disebabkan penderitaannya dan aku tersakiti sebab tersakiti hatinya.

إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ ، فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَتْ : يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لَا تَعْصِبُ لِبَنَاتِكَ ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ، فَسَمِعَتْهُ حِينَ تَشْهَدُ يَقُولُ : أَمَّا بَعْدُ ، أَنْكِحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ ، فَحَدَّثَنِي وَصَدَّقَنِي ، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي ، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا ، وَاللَّهِ ، لَا يَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخُطْبَةَ .

Ali r.a pernah meminang putri Abu Jahal, lalu Fatimah mendengar hal itu, kemudian dia menemui Rasulullah Saw. Dan berkata, "umat anda mengatakan bahwa anda tidak akan marah demi putri anda dan sekarang ini Ali akan menikahi putri Abu Jahal. Kemudian Nabi Saw, beranjak dari tempat duduknya, lalu aku mendengar beliau membaca tasyahud di dalam pidatonya dan bersabda "Amma ba'd, aku memang telah menikahkan Abu Al-'Ash bin Rabi' (dengan salah satu putriku sebelum dia masuk islam), kemudian dia membenarkanku (masuk islam). Sungguh, Fatimah adalah bagian dari diriku dan aku tidak suka Ali menyakiti hatinya. Demi Allah putri Rasulullah Saw. Tidak boleh berkumpul dengan putri musuh Allah (dimadu) oleh seorang suami. Mendengar itu Ali membatalkan pinangannya.

صحيح ابن حبان بأحكام الأرنؤوط - (ج 15 / ص 156)

أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة قال : فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في ذلك على منبره وأنا يومئذ كالمحتلم فقال : (إن فاطمة مني وإني أخاف أن تفتن في دينها) وذكر صهرها له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن قال : (حدثني فصدقي ووعدني فوفى لي وإني لست أحرِم حلالاً ولا أحل حراماً و لكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكاناً واحدا أبداً

Ali bin Abi Thalib melamar putri Abu Jahal untuk dimadukan dengan Fatimah a.s. Aku mendengar Rasulullah berpidato dihadapan manusia menyampaikan hal itu dimimbar ini, aku waktu itu sudah dewasa, beliau bersabda,"Fatimah bagian dariku, aku khawatir akan terjadi fitnah pada dirinya.... Aku tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Akan tetapi demi Allah, putri Rasulullah Saw. Tidak akan berkumpul dengan putri musuh Allah.

Selain itu, dalil yang juga digunakan sebagai alasan bagi pihak yang kontra poligami adalah ayat Alquran tentang ketidakmampuan seseorang untuk berlaku adil. Hal ini sebagaimana firman Allah,

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ [النساء/129]

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. (QS. An-Nisa:129)

7. Madzhab Moderat Poligami

Jika poligami dipraktekkan tanpa mengikuti rambu-rambu yang ditetapkan dalam Islam dan dipraktekkan oleh Rasulullah, maka praktek poligami akan bermasalah bahkan bisa haram bagi mereka yang melakukannya tanpa memenuhi syarat. Dan Jika poligami dilarang berdasarkan hadist pelarangan Rasulullah terhadap rencana Sayyidina Ali untuk berpoligami, tentunya akan bertentangan dengan poligami yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan juga bertentangan dengan Alquran yang secara jelas membolehkan poligami. Oleh karena itu perlu kiranya hadist-hadist diatas dijelaskan secara rinci dan jelas.

Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA. Dalam bukunya "Otoritas Sunnah Non Tasyri'iyah Menurut Yusuf Qardhawi", menjelaskan hadist-hadist yang digunakan oleh kelompok yang kontra terhadap kebolehan poligami dengan menampilkan pendapat Ibn al-Tin, sesuai yang dikutip Ibnu Hajar, mengatakan bahwa pemahaman yang benar dari kisah ini adalah Nabi Saw. Mengharamkan Ali untuk mengumpulkan putrinya (Fatimah) dengan putri Abu Jahal. Menurut Nabi Saw. Hal tersebut dapat menyakiti hatinya, sementara menyakiti Nabi hukumnya haram menurut kesepakatan Ulama. Maksud dari perkataan Nabi "aku tidak mengharamkan yang halal" yaitu putri Abu Jahal adalah halal bagi Ali kalau dia tidak sedang beristrikan Fatimah. Sedangkan mengumpulkan antara keduanya sehingga menyakiti hati Nabi disebabkan sakit hati Fatimah hukumnya tidak boleh.

Sebagian ulama lain mengatakan, perkawinan tersebut dibolehkan bagi Ali, Nabi melarang hanya untuk menjaga perasaan Fatimah dan Ali pun tidak meneruskan keinginannya, karena patuh kepada perintah Nabi Saw. Sementara Ibnu Hajar berpendapat bahwa ini termasuk kekhususan bagi Nabi Saw. tidak boleh putri-putrinya dimadukan, khususnya Fatimah r.a.¹⁸

¹⁸ Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non Tasyri'iyah Menurut Yusuf Qaradhwai*,

Dari beberapa pendapat ini, Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa larangan Nabi terhadap Ali r.a untuk berpoligami adalah dalam kapasitas beliau sebagai manusia biasa, yang mempunyai rasa kasih sayang seperti rasa kasih sayang yang dimiliki manusia lain terhadap putrinya.

Pendapat yang sama juga ditulis oleh KH. Afifuddin Muhajir bahwa jika ditimbang lebih jauh, sikap Rasulullah melarang Sayyidina Ali untuk berpoligami tampaknya lebih ideal dari pada memberi restu. Karena kalau Rasulullah memberi izin kepada Sayyidina Ali, maka harus ditiru oleh umatnya. Jadi mertua harus merelakan menantunya menikah lagi dengan perempuan lain. Masih menurut KH, Afifuddin Muhajir, bahwa ini adalah pilihan yang berat. Sikap Rasulullah ini menunjukkan bahwa beliau adalah manusia biasa. Jadi secara kemanusiaan, memang semestinya mertua tidak mengizinkan anaknya dimadu.¹⁹

Sampai disini dapat diambil benang merah, bahwa larangan Rasulullah dalam masalah poligami ini bukanlah larangan yang berkonsekuensi haram dan tidak boleh. Tapi hanya larangan yang timbul dari Rasulullah dalam kapasitas beliau sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, poligami tetap diperbolehkan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Dan perlu diingat pula bahwa ayat tentang poligami pada surat An-Nisa` yang telah ditulis di atas, hendaknya jangan dipasung untuk melegalkan pemuasan libido seksual kaum lelaki. Sebaliknya, ayat ini mesti diletakkan dalam kajian syariat yang membebaskan dengan tidak mengenyampingkan aspek kesejarahan tentang praktik poligami yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dengan perspektif seperti ini, dimensi moralitas dalam ayat poligami di atas menjadi titik sentral untuk dipertimbangkan. Sebab, Hukum tanpa etika adalah kedurjanaan dan etika tanpa hukum hanyalah utopia yang jauh dari bangunan pranata sosial yang harmonis dan diidamkan.²⁰

C. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Islam membolehkan poligami dengan syarat mampu berlaku adil

(Jogjakarta: AR-RUZZ Media, 2011), hal. 405.

¹⁹ KH. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Menggugat Pemilihan Langsung*, (Jember: Pena Salsabila, 2009), hal. 93-94.

²⁰ Abu Yasid, , *Nalar dan Wahyu, Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syariat* (Jakarta: Erlangga, 2007), hal. 107

dalam hal-hal yang bersifat material seperti dalam masalah nafkah, tempat tinggal dan pembagian giliran. Poligami dilakukan tidak dalam rangka sebagai pemuasan nafsu belaka, tapi seharusnya disertai dengan tujuan-tujuan mulia sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah berpoligami dengan tujuan-tujuan mulia diantaranya adalah misi dakwah dan perjuangan. Adapun orang yang berpoligami tanpa memenuhi syarat yang telah ditetapkan, maka hukumnya adalah haram. Dan hendaknya bagi muslim Indonesia yang ingin melakukan poligami mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia demi kemaslahatan dalam keluarga yaitu melalui proses di Pengadilan Agama dan baru melakukan poligami setelah mendapatkan izin dari pengadilan.

Prespektif sosiologi gender seseorang yang bermaksud melaksanakan poligami harus mempertimbangkan dengan matang dan bertanya pada nuraninya, apakah dirinya mampu berlaku adil di antara isteri-isterinya dan anak-anaknya, apakah ia mampu mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material mereka. Pertimbangan tidak hanya bersandar pada kekayaan material dan kekuasaan yang menunjukkan keperkasaan (superioritas) dan dominasi lelaki terhadap perempuan, Begitu pun pertimbangan alasan memilih poligami sebagai penyaluran hasrat seksual secara halal daripada memilih penyaluran syahwat melalui perbuatan zina, merupakan solusi yang tidak tepat, malah merupakan alasan yang menunjukkan sikap arogansi kaum lelaki dalam melampiaskan keserakahan libidonya, sekaligus merendahkan martabat kaum perempuan, dengan menempatkannya sebagai objek, dan bukannya sebagai subjek yang setara dengan kaum lelaki dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad al-Jurjawi, Ali, *Hikmatu Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu*, Beirut: Darul Fikr, 2009.
- Ar-Razi, Fakhruddin, *Tafsir al-Razi/ Mafatihul Ghaib*, Maktabah Syamilah, Juz 5.
- Dahlan, Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia, Cet 1*. Jakarta: Jamunu, 1969.
- Hamid, Al-Qamar, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- Ibnu Hibban, *Shohih Ibnu Hibban*, Maktabah Syamilah, Juz 9.
- Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 2010.

- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995.
- M. Jakfar, Tarmizi, *Otoritas Sunnah Non Tasyri'lyah Menurut Yusuf Qaradhawi*, Jogjakarta: AR-RUZZ Media, 2011.
- Menisi, Samiyah, *Muhammad Rahmat Bagi Wanita*, Jakarta: PT. Qof Media Kreativa, 2016.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008
- Muhajir, Afifuddin, *Fiqh Menggugat Pemilihan Langsung*, Jember: Pena Salsabila, 2009.
- Shihab, Quraish, *Wawasan al-Quran*.
- Yasid, Abu, *Nalar dan Wahyu, Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syariat*, Jakarta: Erlangga, 2007 .
- Yasid, Abu, Shaleh, Munif, *Epistemologi Fiqh, Unsur Subtansi, Metodologi dan Aplikasi Ajarannya*, Situbondo: Ibrahimy Press, 2010.

LISAN AL-HAL

JURNAL PENGEMBANGAN PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY